



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2 0 1 7**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2018**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal Daerah, dalam rangka mendorong peningkatan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2016 melaksanakan 42 (kegiatan) kegiatan dalam 8 (delapan) program untuk mencapai 5 (lima) sasaran sebagai implementasi Rencana Strategik dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.

Pencapaian kinerja Kegiatan berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan metode/cara/langkah yang telah ditentukan, didapatkan bahwa secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 *berhasil dicapai* dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Rata-rata pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 sebesar 86,59% dengan prosentasi realisasi keuangan sebesar 80,77% dalam kategori **EFISIEN**.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun mendatang, maka strategi yang perlu ditempuh antara lain sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung Tahun 2017 merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021, agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip *value for money* (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasilguna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggungjawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LAKIP tahun 2016 ini, disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategik BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan ini disampaikan memenuhi sebagian kewajiban akuntabilitas instansi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.3 Permasalahan Umum.....	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Penetapan Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	14
3.2 Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	17
3.3 Kendala dan Hambatan	
3.4 Akuntabilitas Keuangan Instansi.....	23
	25
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	28
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Dasar Hukum

Keberadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Peringkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. **Sekretariat** mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian, terdiri dari 3 Sub Bagian :

- Sub Bagian Program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisis data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

- Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian
3. **Bidang Promosi Penanaman Modal** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penanaman modal serta promosi penanaman modal daerah terdiri dari 2 Sub Bidang :
- Sub Bidang Pullahta Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data serta evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
 - Sub Bidang Promosi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan promosi potensi daerah dan penyusunan profil investasi daerah komoditi unggulan.
4. **Bidang Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal** mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, kerjasama dan pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2 Sub Bidang :
- Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan penanaman modal.

- Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama dan pengembangan iklim penanaman modal.

5. **Bidang Pengendalian Penanaman Modal** mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal terdiri dari 2 Sub Bidang :

- Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi pelaksanaan penanaman modal.

- Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan, kegiatan pelaksanaan penanaman modal.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

c. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan penanaman modal.
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal.
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

1.3 PERMASALAHAN UMUM

Identifikasi secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- Adanya tuntutan ganti rugi tanah/lahan yang tidak proporsional oleh sebagian masyarakat disekitar lokasi perusahaan terhadap investor.
- Adanya tumpang tindih antar sektor usaha (Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan) dan juga lahan yang dikuasai masyarakat terutama terhadap kegiatan usaha yang memerlukan luas lahan yang baru.
- Belum adanya keseragaman lembaga (Badan/Dinas) di Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal secara khusus, akibatnya menyulitkan Provinsi dalam melakukan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan Penanaman Modal.
- Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya.
- Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Adapun perjanjian kinerja terlampir.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan selatan adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- INSTANSI : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
- TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal Daerah.
- FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal Daerah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanaman Modal.
 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan promosi penanaman Modal.
 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan penanaman modal Daerah.
 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal Daerah.
 6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET (%)
1	Peningkatan Rencana/ Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	<p><u>Makna Indikator :</u> Rencana/nilai investasi yang terdiri atas persetujuan perijinan ataupun izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang telah diterbitkan</p> <p><u>Cara Menghitung Indikator :</u> Peningkatan nilai investasi dibagi target peningkatan investasi x 100%</p>	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua SKPD yang terkait	15
2	Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	<p><u>Makna Indikator :</u> Realisasi investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)</p> <p><u>Cara Menghitung Indikator :</u> Peningkatan nilai investasi dibagi target peningkatan investasi x 100%</p>	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua SKPD yang terkait	15

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan tahun 2016 , maka Rencana Kerja (Renja) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- Penyediaan jasa surat-menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa Administrasi keuangan
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

- Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
- Pengembangan wawasan SDM BKPM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
- Penyelenggaraan pameran investasi
 - Kerjasama bidang penanaman modal
 - Pembinaan pelayanan penanaman modal
 - Penyusunan dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah
 - Inventarisasi data sistem informasi potensi daerah (SIPID)
- f) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
- Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - Monitoring, evaluasi investasi daerah
 - Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal
 - Penyusunan dokumen RUPM
 - Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat

Adapun Rencana Kerja Tahunan BKPMMD Prov Kalsel Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target sesuai RPJMD
1.	Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 9.932.221.192.000
2.	Peningkatan Rencana/Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	Rp. 9.233.876.067.500

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Adapun perjanjian kinerja terlampir.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan selatan adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- INSTANSI : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
- TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal Daerah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanaman Modal.
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan promosi penanaman Modal.
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan penanaman modal Daerah.
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal Daerah.
6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET (%)
1	Peningkatan Rencana/ Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	<p><u>Makna Indikator :</u> Rencana/nilai investasi yang terdiri atas persetujuan perijinan ataupun izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang telah diterbitkan</p> <p><u>Cara Menghitung Indikator :</u> Peningkatan nilai investasi dibagi target peningkatan investasi x 100%</p>	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua SKPD yang terkait	15
2	Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	<p><u>Makna Indikator :</u> Realisasi investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)</p> <p><u>Cara Menghitung Indikator :</u> Peningkatan nilai investasi dibagi target peningkatan investasi x 100%</p>	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua SKPD yang terkait	15

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan tahun 2016 , maka Rencana Kerja (Renja) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- Penyediaan jasa surat-menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa Administrasi keuangan
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

- Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
- Pengembangan wawasan SDM BKPM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
- Penyelenggaraan pameran investasi
 - Kerjasama bidang penanaman modal
 - Pembinaan pelayanan penanaman modal
 - Penyusunan dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah
 - Inventarisasi data sistem informasi potensi daerah (SIPID)
- f) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
- Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - Monitoring, evaluasi investasi daerah
 - Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal
 - Penyusunan dokumen RUPM
 - Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat

Adapun Rencana Kerja Tahunan BKPMMD Prov Kalsel Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target sesuai RPJMD
1.	Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 9.932.221.192.000
2.	Peningkatan Rencana/Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	Rp. 9.233.876.067.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam perencanaan program kerja tahun 2016, BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, tetapi untuk beberapa kegiatan indikator kinerja di atas *output* belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *ouput* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Dengan demikian pengukuran kinerja BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- 1) *Lebih dari 90%* untuk kategori capaian ***Sangat Baik***;
- 2) *80% s/d 90%* untuk kategori capaian ***Baik***;
- 3) *60% s/d 80%* untuk kategori capaian ***Cukup***; dan
- 4) *Kurang dari 60%* untuk kategori capaian ***Kurang***.

Capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut

LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

BKPMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (sesuai RPJMD)		CAPAIAN		persentase capaian	PERMASALAHAN
			%	Rp	Realisasi (Rp) *angka sementara s.d. Oktober 2016 (Tw.III)	Peningkatan Realisasi (%)		
1	Peningkatan Rencana/ Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15,00%	9.233.876.067.500	8.653.272.297.417	7.77%	93,71%	- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Pelayanan belum optimal
2	Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	15,00%	9.932.221.192.000	9.504.960.000.000	10.05%	95.70%	- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajiban menyampaikan LKPM - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat Provinsi dan Kab/Kota - Sinkronisasi perencanaan bidang penanaman modal - Perlambatan ekonomi global yang berdampak dinegara Indonesia - Investor luar negeri tidak lagi membeli batubara perusahaan yang ada beralih kepada BBM, karena BBM dinilai lebih murah - Harga karet ditingkat petani penggarap harganya sangat murah, mengakibatkan para petani karet berpindah profesi keusaha lain - Harga Kelapa sawit tandan buah segar yang tidak stabil cenderung menurun

3.1 ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator dengan masing-masing target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Capaian sasaran strategis dan indikator berdasarkan target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
--------------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini dapat diukur dari 1 (satu) indikator kinerja. Yaitu realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ini dicapai melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi. Target dan Capaian dari Indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RPJMD 2016	REALISASI INVESTASI Angka sementara
Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	<p>1. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Monitoring dan evaluasi investasi daerah - Penatalaksanaan perencanaan dan program - Penyusunan dokumen RUPM - Rapat Koordinasi perencanaan penanaman tingkat provinsi dan pusat 	Rp. 9.932.221.192.000	Rp 7.849.617.800.000
Peningkatan Rencana /Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	<p>2. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p>	Rp 9.233.876.067.500	Rp. 8.653.272.297.417

		<p>Kegiatan : Penyelenggaraan pameran investasi Kerjasama bidang penanaman modal Pembinaan pelayanan modal</p> <p>Penyusunan dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah Investasi data sistem informasi potensi daerah (SIPID)</p>		
--	--	---	--	--

Adapun kinerja individu jabatan struktural eselon III disajikan pada tabel berikut:

Jabatan	Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Sekretaris	Mengelola penatausahaan urusan kepegawaian, kelembagaan, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi perkantoran lainnya	Program Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan logistik kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	100 %	87,91 %

		daerah		
		<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan komputer - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 	100 %	74,28 %
		<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wawasan BKPM Provinsi Kalimantan Selatan - Kursus, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis PNS 	100 %	97,5 %

		<p>Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun 	100 %	95 %
		<p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal - Penyusunan dokumen RUPM - Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat 	100%	100 %
Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Efektifitas Promosi	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pameran investasi - Penyusunan dokumen (buku) peluang dan potensi investasi - Inventarisasi data sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) 	100 %	90 %

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Kerjasama bidang penanaman modal - Pembinaan pelayanan penanaman modal	100 %	100 %
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan intensitas pengendalian pelaksanaan investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Monitoring dan evaluasi investasi daerah - Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 %	95 %

Adapun kinerja individu jabatan struktural eselon IV disajikan pada tabel berikut :

Jabatan	Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Mengelola penatausahaan urusan kepegawaian, kelembagaan, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi perkantoran lainnya	<p>Program Administrasi Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan logistik kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan komputer - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 	100 %	75 %

		<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wawasan BKPM Provinsi Kalimantan Selatan 		
Kasubbag Keuangan	Mengelola penatausahaan keuangan BKPM Provinsi Kalsel	<p>Program Administrasi Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 	100 %	95 %

		<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional <p>Program Pengembangan Sistem capaian Pelaporan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 		
Kasubbag Program	Penyusunan bahan perencanaan program/kegiatan BKPMD Prov Kalsel serta perencanaan penanaman modal kalsel	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan perencanaan dan programl - Penyusunan dokumen RUPM - Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat 	100 %	100 %
		<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi data sistem 		

Kasubbid Pullahta PM	Pengolahan data dan penyusunan potensi atau peluang investasi daerah	informasi potensi investasi daerah (SIPID)	100 %	90 %
Kasubbid Promosi PM	Promosi investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Penyelenggaraan pameran investasi - Penyusunan dokumen (buku) peluang dan potensi investasi daerah	100 % 100%	90 % 90%
Kasubbid Pelayanan PM	Sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Pembinaan pelayanan penanaman modal	100 %	100 %
Kasubbid Kerjasama dan Pengembangan Iklim	Kerjasama penanaman modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Kerjasama bidang penanaman modal	100 %	100%
Kasubbid Pembinaan PM	Penyelesaian permasalahan dan pembinaan perusahaan yang bermasalah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Monitoring dan evaluasi investasi daerah	100 %	90 %
Kasubbid Pengawasan PM	Pengawasan terhadap PMA / PMDN kalsel	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 %	95 %

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilakukan diatas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021 dan Target Nasional dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 dikategorikan berhasil dengan *sangat baik*, dengan persentase penilaian diatas 90%.

3.2 KENDALA DAN HAMBATAN

1. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan

Identifikasi secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- Adanya peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih khususnya dalam penanganan pelayanan di bidang penanaman modal yaitu dengan diterbitkannya Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tentang PM dalam rangka PMA & PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap) karena kewenangan pelayanan perijinan masih dipegang oleh pusat. belum dilimpahkan ke daerah.
- Adanya tuntutan ganti rugi tanah/lahan yang tidak proporsional oleh sebagian masyarakat disekitar lokasi perusahaan terhadap investor.
- Adanya tumpang tindih antar sektor usaha (Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan) dan juga lahan yang dikuasai masyarakat terutama terhadap kegiatan usaha yang memerlukan luas lahan yang baru.
- Belum adanya keseragaman lembaga (Badan/Dinas) di Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal secara khusus, akibatnya menyulitkan Provinsi dalam melakukan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan Penanaman Modal.
- Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

- Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.

2. Solusi Mengatasi Kendala dan Hambatan

Dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada Badan Koorodinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah diupayakan :

- a. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM, BKPMD provinsi, IPMK dan para pengusaha/calon pengusaha, dan menggalang kemitraan.
- c. Pelaksanaan evaluasi LKPM oleh IMPK sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 61/SK/2004, sulit dilaksanakan oleh IPMK karena tidak didukung oleh data yang akurat. Untuk itu SK. tersebut perlu ditinjau kembali.
- d. Perlunya revisi Keppres Nomor 29 Tahun 2004, karena tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- e. Melakukan rapat-rapat baik regional maupun koordinasi guna pemecahan masalah terbitnya Keppres Nomoe 29 Tahun 2004, ketidak seragaman nomenclator Instansi Penanaman Modal di Kabupaten/Kota, promosi bersama serta permasalahan lainnya.
- f. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagai. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
- g. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN INSTANSI TAHUN LALU

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun anggaran 2015 dan dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun anggaran 2015 dan dibandingkan dengan tahun anggaran 2016

NO	Program/ Kegiatan	Tahun anggaran		Perbandingan / selisih tahun 2015 dan 2016	Realisasi	
		2015	2016		2015	2016
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,830,550,600	2.630.220.000	799.669.400	1.463.969.835 (79,97%)	1.943.928.750 (76%)
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,284.638.750	953.004.000	(331.634.750)	1.092.971.583 (85,08%)	596.165.200 (58%)
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	70.862.800		70.862.800	70.862.800 (100,%)	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	148,700,000	361.970.000	213.270.000	59.265.000 (39,85%%)	336.178.700 (94,08%%)

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.275.000	15.000.000	2.725.000	6.625.000 (53,97%)	12.917.000 (86,11%)
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2,472,975,400	1.868.540.000	(604.435.400)	2.137.387.552 (86,42%)	1.476.748.345 (84,13%)
7	Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	1,115,800,575	1.308.656.000	189.855.425	1.069.748.436 (95,87%%)	1.210.184.600 (91,34%%)
JUMLAH		6.935.803.125	7.137.390.000	2.212.452.775	5.900.830.206 (85,08%)	5.576.122.595 (78,13%)

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan BKPM Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 telah menganggarkan dana kegiatan untuk belanja langsung sebesar Rp.6.935.803.125,- yang terealisasi sebesar Rp.5.900.830.206,- atau sebesar 85,08%, pada tahun 2016 Rp.7.137.390.000,- yang terealisasi sebesar Rp.5.576.122.595,- atau sebesar 78,13%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016 sebesar 78,13% dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi serapan anggaran sebesar 76%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi serapan anggaran sebesar 58%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi serapan anggaran sebesar 94,08%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, realisasi serapan anggaran sebesar 86,11%.
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, realisasi serapan anggaran sebesar 84,13%.
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, realisasi serapan anggaran sebesar 91,34%.

Adapun rincian rencana dan realisasi pelaksanaan Program / Kegiatan terlampir

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan sangat baik.

Penyusunan LAKIP BKPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi BKPM Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2016. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2016 ini BKPM Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat di pertanggung jawabkan.

Secara keseluruhan dalam tahun 2016 terdapat 1 sasaran stratejik yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk mengukur keberhasilannya, terhadap masing-masing sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran yang melekat sesuai dengan stratejiknya. Dari sasaran stratejik tahun 2016 yang telah ditetapkan di dalam perencanaan stratejik BKPM Provinsi Kalimantan Selatan, seluruhnya dapat dicapai dengan baik.

4.2 SARAN

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja BKPM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung Tahun 2016 merupakan bagian dari Rencana Strategik 2011 - 2015, agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip *value for money* (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal BKPM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.